

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional seharusnya mencerminkan pembangunan manusia secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun realitas menunjukkan masih banyak ketimpangan, terutama dalam aspek gender. Masih banyak terdapat kesenjangan dan ketidakadilan yang masih belum terselaikan. Seperti masalah ketimpangan hasil dari suatu pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Dimana perempuan tidak mendapatkan hak yang sama sebagai mana mestinya. Hak yang dimaksud ialah hak untuk berdaya dan dapat bersaing secara adil dan mendapatkan kesetaraan yang sama.¹ Perempuan bisa melakukan transformasi perubahan dalam sistem pemerintahan. Pembangunan telah menjadi isu strategis yang gencar dibicarakan. Pembangunan menuntut Negara untuk mengusahakan lebih keras lagi agar bisa mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada. Agar pembangunan bisa tercapai maka dibutuhkan langkah-langkah yang nyata seperti dengan cara pemberdayaan masyarakat dan mengatasi problem ketimpangan gender.²

Ketimpangan gender merupakan persoalan struktural yang masih berlangsung di Indonesia sebagai akibat dari relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh sistem sosial dan budaya patriarki.³ Ketimpangan ini tercermin dari Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia tahun 2022 yang masih berada pada angka 0,459 (nilai indeks pada skala 0-1), menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan sekitar 45,9% potensi pembangunan manusia akibat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Semakin mendekati angka 1, semakin besar ketimpangan gender yang terjadi, sedangkan nilai 0 menunjukkan kesetaraan penuh. Angka 0,459 tersebut mencerminkan masih lebarnya kesenjangan gender

¹ Ahmad Yani Yani, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Sektor Nonformal Pada Pembinaan Narapidana Perempuan Melalui Program Keterampilan Menjahit Di Lembaga Masyarakat," *Transformasi: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Nonformal Informal* 3, No. 2 (April 6, 2018), Accessed March 14, 2025.

² Rezza Widia Utami And Stevany Afrizal, "Implementasi Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Di Kelurahan Kepuh," *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13, No. 2 (October 2022): 738, <https://doi.org/10.26418/J-Psh.V13i2.54679>.

³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 8-11.

dalam tiga dimensi utama, yaitu kesehatan reproduksi (angka kematian ibu dan kelahiran remaja), pemberdayaan (tingkat pendidikan dan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan), serta partisipasi ekonomi (keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja).⁴ Dengan demikian, nilai IKG tersebut menegaskan bahwa ketimpangan gender di Indonesia bukan sekadar fenomena individual, melainkan persoalan struktural yang berdampak langsung pada kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, perempuan masih menghadapi keterbatasan dalam akses pendidikan dan pengambilan keputusan, yang terlihat dari rendahnya keterwakilan perempuan dalam jabatan strategis serta lembaga pengambil kebijakan publik. Pada aspek perlindungan hak, Komnas Perempuan mencatat 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2022, yang menunjukkan bahwa perempuan masih sangat rentan terhadap kekerasan berbasis gender, baik di ranah domestik maupun publik.⁵ Kondisi ini menegaskan bahwa ketimpangan gender tidak bersifat individual, melainkan merupakan persoalan struktural yang berdampak luas terhadap kualitas pembangunan manusia, memperbesar ketimpangan gender, serta menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Di Indonesia, ketimpangan gender masih dipengaruhi kuat oleh budaya patriarki dan relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam struktur sosial.⁶ Realitas nasional tersebut juga tercermin di Provinsi Banten, di mana ketimpangan gender masih tampak dalam tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, keberlanjutan praktik perkawinan anak, serta kuatnya beban ganda perempuan dalam ranah domestik dan publik.⁷ Selain itu, data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten mengindikasikan bahwa praktik perkawinan anak masih ditemukan, khususnya di wilayah pedesaan, yang berdampak pada terhambatnya akses pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kemandirian ekonomi perempuan.⁸ Kondisi ini memperlihatkan bahwa

⁴ Badan Pusat Statistik (BPS), *Indeks Ketimpangan Gender Indonesia 2022* (Jakarta: BPS, 2022), 1-3

⁵ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), 1-2.

⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 72-75.

⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Profil Perempuan Provinsi Banten 2022* (Serang: BPS Provinsi Banten, 2022), 15-20.

⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten 2022* (Serang: BPS Provinsi Banten, 2022), 45-48.

ketimpangan gender di Banten bukan sekadar persoalan individual, melainkan bagian dari persoalan struktural yang menghubungkan isu ketidakadilan gender global dan nasional dengan realitas sosial, budaya, dan ekonomi di tingkat daerah.

Dalam kehidupan masyarakat akar rumput, terutama di wilayah pedesaan, perempuan miskin, marjinal, dan penyandang disabilitas masih berada dalam kondisi sosial yang rentan akibat keterbatasan akses terhadap sumber daya, informasi, dan ruang partisipasi sosial.⁹ Keterbatasan tersebut tercermin dari minimnya akses perempuan terhadap pendidikan kritis, yang berdampak pada rendahnya pemahaman mengenai hak-hak perempuan, kesetaraan gender, serta mekanisme perlindungan hukum.¹⁰ Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, baik dalam keluarga, organisasi masyarakat, maupun forum pembangunan desa, sehingga suara dan kepentingan perempuan kerap terpinggirkan. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan di tingkat komunitas masih sering dipandang sebagai persoalan domestik atau urusan privat keluarga, bukan sebagai isu publik yang membutuhkan perhatian bersama, yang pada akhirnya memperkuat normalisasi kekerasan dan melemahkan upaya pencegahan serta penanganannya.¹¹ Realitas tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketidaksetaraan yang dialami perempuan di tingkat akar rumput bukan semata persoalan individu, melainkan persoalan struktural yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam kehidupan sosial dan menuntut adanya intervensi pemberdayaan berbasis komunitas yang berkelanjutan dan berperspektif gender.

Pemerintah Provinsi Banten telah mengupayakan pengurangan ketimpangan gender melalui kebijakan formal, seperti penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan program perlindungan perempuan dan anak, namun implementasinya di tingkat lokal masih menghadapi berbagai keterbatasan.¹² Sejumlah kajian akademik menunjukkan bahwa kebijakan

⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 66–69.

¹⁰ Badan Pusat Statistik, *Profil Perempuan Indonesia 2022* (Jakarta: BPS, 2022), 55–58

¹¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), 12–14.

¹² Pemerintah Provinsi Banten, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017–2022* (Serang: Pemerintah Provinsi Banten, 2017), 112–115.

gender yang bersifat formal dan top-down sering kali kurang efektif menjangkau perempuan akar rumput karena lebih berorientasi pada aspek administratif dibandingkan perubahan relasi kuasa dan kesadaran gender di tingkat komunitas. Kondisi tersebut tercermin di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, di mana perempuan masih menghadapi keterbatasan partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, minimnya akses terhadap pendidikan kesetaraan gender, serta masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap perempuan yang kerap dipandang sebagai persoalan domestik. Data BPS Kabupaten Serang menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan di wilayah ini bekerja di sektor informal dan memiliki tingkat pendidikan relatif rendah, yang memperkuat posisi subordinat perempuan dalam struktur sosial.¹³ Temuan jurnal nasional juga menegaskan bahwa ketimpangan gender di tingkat desa umumnya dipengaruhi oleh kuatnya budaya patriarki dan lemahnya pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas, sehingga kebijakan formal tanpa dukungan intervensi sosial yang kontekstual cenderung menghasilkan perubahan yang lambat dan tidak berkelanjutan.¹⁴ Oleh karena itu, realitas di Banten, khususnya Kecamatan Ciruas, menunjukkan adanya celah antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan nyata perempuan di komunitas, yang menegaskan pentingnya pendekatan alternatif berbasis pemberdayaan masyarakat untuk melengkapi intervensi formal yang telah ada.

Di tengah keterbatasan intervensi formal pemerintah dalam menjangkau perempuan di tingkat akar rumput, Yayasan Bantuan Hukum dan Pendidikan (Bakumdik) hadir sebagai organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada bantuan hukum bagi kelompok rentan serta pendidikan kritis berbasis kesadaran gender sebagai strategi pemberdayaan masyarakat. Peran organisasi masyarakat sipil dinilai penting karena mampu bekerja lebih dekat dengan komunitas, memahami konteks sosial budaya lokal, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perubahan sosial.¹⁵ Dalam praktiknya, Bakumdik tidak hanya menangani kasus-kasus hukum yang dialami perempuan, tetapi juga menempatkan pendidikan sebagai instrumen pencegahan melalui penguatan pengetahuan tentang hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan keberanian bersuara di ruang publik. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan berbasis

¹³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, *Kecamatan Ciruas dalam Angka 2022* (Serang: BPS Kabupaten Serang, 2022), 45–48.

¹⁴ Siti Muslikhati, “Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Desa,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 22, no. 2 (2018): 101–103.

¹⁵ David C. Korten, *Getting to the 21st Century: Voluntary Action and the Global Agenda* (West Hartford: Kumarian Press, 1990), 98–101.

komunitas, sehingga perempuan tidak diposisikan sebagai objek bantuan semata, melainkan sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk memahami persoalan, mengambil keputusan, dan memperjuangkan hak-haknya secara kolektif.¹⁶ Bakumdik berperan sebagai agen pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan, yang menjembatani celah antara kebijakan formal dan kebutuhan nyata di tingkat komunitas, sekaligus memperkuat upaya pencegahan ketimpangan dan kekerasan berbasis gender secara berkelanjutan.

Sebagai respons terhadap ketimpangan gender yang masih dialami perempuan di tingkat akar rumput, Yayasan Bantuan Hukum dan Pendidikan (Bakumdik) mengembangkan Program Sekolah Perempuan sebagai bentuk pendidikan nonformal yang ditujukan bagi perempuan miskin, marjinal, dan penyandang disabilitas yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan kritis dan ruang partisipasi sosial. Program Sekolah Perempuan dirancang untuk meningkatkan kesadaran gender, memperkuat pemahaman tentang hak-hak perempuan, serta mengembangkan kapasitas kepemimpinan perempuan melalui proses pembelajaran yang partisipatif dan berbasis pengalaman hidup peserta.¹⁷ Pendidikan pemberdayaan berbasis komunitas seperti Sekolah Perempuan dinilai efektif karena tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga mendorong refleksi kritis perempuan terhadap relasi kuasa yang timpang dalam keluarga dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Sekolah Perempuan berfungsi sebagai ruang belajar kolektif dan aman, tempat perempuan dapat berbagi pengalaman mengenai ketidakadilan dan kekerasan yang dialami, membangun solidaritas, serta menumbuhkan kepercayaan diri untuk bersuara dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal.¹⁸ Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan partisipatif mampu meningkatkan agensi perempuan, terutama ketika proses pembelajaran mendorong kesadaran akan hak dan posisi sosial perempuan sebagai subjek pembangunan. Program Sekolah Perempuan Bakumdik tidak hanya berperan sebagai alternatif pendidikan bagi perempuan akar rumput, tetapi juga menjadi objek dan fokus penting dalam penelitian ini untuk memahami strategi

¹⁶ Naila Kabeer, "Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment," *Development and Change* 30, no. 3 (1999): 437–440.

¹⁷ Rifat Khuluqin nisa menjelaskan sekolah perempuan (Wawancara, 2025)

¹⁸ Sri Lestari dan Nurul Hidayah, "Peran Pendidikan Nonformal dalam Pemberdayaan Perempuan di Pedesaan," *Jurnal Pendidikan Nonformal* 14, no. 1 (2020): 55–57.

pemberdayaan perempuan berbasis komunitas dalam upaya mengurangi ketimpangan gender di tingkat lokal.¹⁹

Pemberdayaan adalah usaha untuk meningkatkan harkat dan martabat dalam sistem lapisan masyarakat. Pemberdayaan merupakan upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau kekuatan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri serta guna menciptakan kemandirian yang *sustainable*.²⁰ Pemberdayaan perempuan merupakan tahap penyadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih luas lagi. Pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan kemampuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada baik pada dirinya sendiri atau yang ada di sekitarnya. Pemberdayaan bertujuan untuk menciptakan kondisi dimana masyarakat bagi yang sebelumnya terpinggirkan memiliki kekuatan dalam lingkungan sosial, ekonomi maupun dari segi politik.²¹ Untuk dapat melakukan pemberdayaan diperlukan program yang strategis, khususnya untuk perempuan dimana program untuk perempuan biasanya untuk mengedukasi menyadarkan serta membangkitkan perempuan untuk terus mengembangkan kemampuannya karena mereka juga memiliki kesempatan yang sama. Pemberdayaan perempuan merupakan suatu proses strategis yang tujuannya untuk memperkuat kapasitas, kesadaran, dan posisi perempuan agar mampu menjalankan peran penting dalam berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Dengan adanya pemberdayaan, perempuan diberikan akses lebih luas terhadap pendidikan, informasi, sumber daya ekonomi, serta ruang dalam pengambilan keputusan. Tidak sedikit perempuan berhenti sekolah karna faktor- faktor yang menahannya untuk berkembang. Seperti faktor finansial, sosial, *mindset*, dan lain- lain. Akibatnya banyak perempuan tertahan di rumah akibat dari faktor- faktor tersebut. Sedangkan seperti yang kita ketahui pendidikan merupakan proses penting di dalam kehidupan. Dengan pendidikan bisa membuka wawasan lebih terbuka. Sehingga pendidikan telah memiliki peranan yang penting baik laki- laki maupun perempuan.²²

¹⁹ Siti Aminah, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Pendidikan Kritis," *Jurnal Studi Gender* 12, no. 1 (2021): 23–25.

²⁰ Afriansyah Et Al., *Pemberdayaan Masyarakat*, 1st Ed. (Padang, Sumatra Barat: Pt Global Eksekutif Teknologi, 2023).

²¹ Lilis Karwati, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Alam Setempat," *Jiv-Jurnal Ilmiah Visi* 12, No. 1 (June 2017): 45–52, <https://doi.org/10.21009/Jiv.1201.5>.

²² Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Nasional," Last Modified 2022. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Download/294723/Nomor%207%20tahun%202022.Pdf>

Pelaksanaan Program Sekolah Perempuan Desa Cisait Kecamatan Keragilan Kabupaten Serang, menunjukkan adanya dampak awal yang signifikan dalam mendorong perubahan kesadaran dan posisi sosial perempuan di tingkat komunitas. Melalui proses pembelajaran partisipatif dan reflektif, perempuan peserta Sekolah Perempuan mulai menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap ketimpangan gender, khususnya dalam memahami bentuk-bentuk ketidakadilan yang dialami dalam relasi keluarga, sosial, dan kelembagaan lokal.²³ Sejumlah penelitian tentang pendidikan pemberdayaan perempuan berbasis komunitas menegaskan bahwa peningkatan kesadaran gender merupakan prasyarat penting bagi tumbuhnya keberanian perempuan untuk bersuara dan terlibat dalam ruang publik. Dalam konteks ini, perempuan yang mengikuti Sekolah Perempuan mulai memperlihatkan keberanian menyampaikan pendapat dalam forum musyawarah desa, pertemuan kelompok, serta diskusi komunitas yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki.²⁴ Selain itu, keterlibatan perempuan dalam kegiatan organisasi lokal dan aktivitas advokasi juga mengalami peningkatan, baik dalam bentuk partisipasi sebagai anggota kelompok perempuan, pengurus komunitas, maupun pendamping sesama perempuan yang mengalami kekerasan atau pelanggaran hak.²⁵ Temuan ini sejalan dengan kajian jurnal yang menyatakan bahwa pendidikan kritis berbasis pengalaman hidup perempuan mampu memperkuat agensi dan kepemimpinan perempuan di tingkat lokal.²⁶ Program Sekolah Perempuan memiliki potensi yang kuat sebagai strategi efektif dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pengurangan ketimpangan gender, karena tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga membangun kesadaran, keberanian, dan kapasitas kolektif perempuan sebagai subjek perubahan sosial yang berkelanjutan.

Diskriminasi kepada perempuan yang termarginalkan dikarenakan ketimpangan khususnya di Indonesia, yang membudayakan sikap patriarki di dalam rumah tangga. Budaya ini cukup memberikan dampak yang signifikan bagi perempuan yang dimana mereka beranggapan kendali tunggal hanya ada pada laki-laki dalam segala hal. Persepsi tersebut

²³ Rifat Khuluqin Nisa menjelaskan Pelaksanaan Program Sekolah Perempuan, (Wawancara, 2025)

²⁴ Naila Kabeer, "Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment," *Development and Change* 30, no. 3 (1999): 437–440.

²⁵ Yayasan Bantuan Hukum dan Pendidikan (Bakumdik), *Laporan Kegiatan Sekolah Perempuan Tahun 2024* (Serang: Bakumdik, 2024), 10–13.

²⁶ Siti Muslikhati, "Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Berbasis Komunitas," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 4, no. 2 (2019): 85–88.

seringnya menganggap laki-laki mempunyai peranan yang besar dalam mengangkat derajat wanita. Budaya patriarki menempatkan laki-laki memiliki sistem di atas sementara perempuan berada di bawahnya sehingga membuat perempuan tidak memiliki akses yang sama seperti laki-laki. Kebudayaan tersebut telah menjadi penyebab maraknya sikap diskriminatif, pembatasan, eksploitasi, serta perilaku kekerasan terhadap perempuan.²⁷ Diskriminasi beban ganda yang dialami oleh setiap perempuan telah menjadi dinamika yang terus diperbincangkan dalam studi gender. Beban gender dimana keharusan perempuan untuk menjalani dua peran sekaligus yaitu tetap melakukan pekerjaan domestik dan pemenuh ekonomi kebutuhan hidup. Diskriminasi dalam bidang pendidikan juga masih sering dirasakan bagi perempuan termarginalkan khususnya di pedesaan, masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi. Perempuan juga mengalami diskriminasi dalam pengambilan keputusan seringkali keputusan perempuan tidak dihargai karena dianggap tidak relevan. Dari banyaknya permasalahan yang ada oleh sebab itu diperlukan lembaga atau organisasi yang mampu membangkitkan perempuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepemimpinan agar perempuan bisa turut serta dalam pengambilan keputusan²⁸

Berbagai studi menunjukkan bahwa pendidikan pemberdayaan perempuan berbasis komunitas memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran gender, partisipasi sosial, dan kapasitas kepemimpinan perempuan di tingkat lokal. Pendidikan nonformal yang bersifat partisipatif dinilai mampu menjangkau perempuan miskin, marginal, dan penyandang disabilitas yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal dan proses pengambilan keputusan. Namun demikian, sebagian besar kajian akademik masih berfokus pada pendekatan kebijakan makro, program pemerintah, atau organisasi besar, sementara analisis mendalam mengenai praktik pemberdayaan yang dijalankan oleh organisasi masyarakat sipil di tingkat komunitas masih relatif terbatas.²⁹ Kondisi ini

²⁷ Sarah Apriliandra And Hetty Krisnani, "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, No. 1 (January 2021): 1, <https://doi.org/10.24198/Jkrk.V3i1.31968>.

²⁸ Amelia Susanto Putri And Prawinda Putri Anzari, "Dinamika Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Petani Di Indonesia," *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (Jihi3s)* 1, No. 6 (June 2021): 757–63, <https://doi.org/10.17977/Um063v1i6p757-763>.

²⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 120–124.

menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pemberdayaan perempuan yang berkembang di lapangan dengan kajian akademik yang tersedia.

Secara khusus, meskipun Program Sekolah Perempuan telah banyak diimplementasikan oleh organisasi masyarakat sipil di berbagai daerah sebagai strategi pendidikan kesadaran gender, kajian yang secara sistematis menganalisis peran Sekolah Perempuan dalam mengatasi ketimpangan gender masih sangat terbatas, terutama yang mengkaji proses, peran, dan dinamika perubahan sosial yang terjadi di tingkat akar rumput.³⁰ Sejumlah jurnal nasional mencatat bahwa program pemberdayaan perempuan sering kali hanya dinilai dari output administratif atau jumlah peserta, tanpa menggali bagaimana proses pendidikan tersebut membentuk kesadaran kritis, keberanian bersuara, dan perubahan relasi kuasa perempuan dalam keluarga maupun komunitas.³¹ Akibatnya, kontribusi nyata Sekolah Perempuan terhadap pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketimpangan gender belum terdokumentasi secara memadai dalam literatur akademik.

Dalam konteks tersebut, kajian terhadap Program Sekolah Perempuan Bakumdik menjadi penting dan relevan untuk mengisi kekosongan penelitian yang ada. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis peran Sekolah Perempuan Bakumdik dalam meningkatkan kesadaran gender dan pemberdayaan perempuan, tetapi juga untuk memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian pemberdayaan perempuan berbasis komunitas serta kontribusi praktis bagi penguatan desain dan implementasi program Sekolah Perempuan ke depan.³² Dengan demikian, berdasarkan latar belakang di atas penulis mencoba melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Sekolah Perempuan Dalam Meningkatkan Kesadaran Gender dan Kepemimpinan Oleh Yayasan Bantuan Hukum dan Pendidikan (Bakumdik) di Desa Cisait Kecamatan Keragilan Kabupaten Serang”.

³⁰ Sri Lestari dan Nurul Hidayah, “Pendidikan Nonformal dan Pemberdayaan Perempuan di Tingkat Desa,” *Jurnal Pendidikan Nonformal* 14, no. 1 (2020): 52–54.

³¹ Siti Aminah, “Kesenjangan Kajian Pemberdayaan Perempuan Berbasis Komunitas,” *Jurnal Studi Gender* 12, no. 2 (2021): 101–104.

³² Naila Kabeer, “Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women’s Empowerment,” *Development and Change* 30, no. 3 (1999): 437–440.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Yayasan Bantuan Hukum dan Pendidikan (Bakumdik) melalui Program Sekolah Perempuan?
2. Bagaimana peran dan dampak Program Sekolah Perempuan terhadap peningkatan kesadaran gender dan kepemimpinan perempuan di tingkat komunitas?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan pemberdayaan perempuan melalui Program Sekolah Perempuan Bakumdik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis proses pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Yayasan Bantuan Hukum dan Pendidikan (Bakumdik) melalui program Sekolah Perempuan
2. Mengetahui peran dan dampak Program Sekolah Perempuan terhadap peningkatan kesadaran gender dan kepemimpinan perempuan di tingkat komunitas.
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan pemberdayaan perempuan melalui Program Sekolah Perempuan Bakumdik.

D. Manfaat Penelitian

Dari maksud penelitian tersebut oleh karena itu penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai pemberdayaan perempuan melalui Program Sekolah Perempuan yang dilaksanakan oleh Yayasan Bantuan Hukum dan Pendidikan (Bakumdik), khususnya dalam memahami peran pendidikan nonformal berbasis komunitas dalam meningkatkan kesadaran gender dan kapasitas perempuan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini mempunyai manfaat praktis untuk beberapa pihak, yaitu:

a. Bagi Peneliti

Penyusun skripsi akan menjadi pengalaman yang bagus bagi peneliti, menambah pengetahuan dan pemahaman di bidang pengembangan pemberdayaan perempuan melalui program sekolah perempuan oleh Yayasan Bantuan Hukum dan Pendidikan (BAKUMDIK).

- b. Masukan dan Kritik dari hasil penelitian bisa menjadi acuan untuk pengembangan pemberdayaan perempuan oleh Yayasan Bantuan Hukum dan Pendidikan (Bakumdik). Tahap ini bisa menjadi awal kegiatan pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kesadaran gender dan kepemimpinan di suatu kelompok atau masyarakat.
- c. Bagi Akademisi
 Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber acuan bagi peneliti selanjutnya dalam membuat program yang memiliki keterkaitan dengan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kesadaran gender dan kepemimpinan. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi petunjuk untuk karya ilmiah di UIN SMH Banten dan lembaga terkait lainnya yang memiliki topik dan keterkaitan yang sejalan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi, penting untuk merencanakan sistematika pembahasan dengan baik dan benar. Berikut adalah uraian singkat dari sistematika yang akan disusun:

BAB I PENDAHULUAN yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Teori berisi tentang Penelitian Terdahulu, Kajian Teori, dan Kerangka Pemikiran.

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN menjelaskan tentang Objek Penelitian dan Metode Penelitian.

BAB IV Menyajikan temuan lapangan mengenai bentuk pemberdayaan perempuan melalui Program Sekolah Perempuan, termasuk manfaat dan dampak yang dihasilkan terhadap kesadaran gender dan kepemimpinan perempuan berdasarkan teori tahapan Pemberdayaan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto.

BAB V Menguraikan analisis hasil penelitian berdasarkan teori pemberdayaan perempuan Naila Kabeer, dan menganalisis Faktor Pendukung dan Penghambat.

BAB VI PENUTUP

Bab penutup pada penelitian ini akan membahas tentang kesimpulan penelitian dan saran.